

Uraian Singkat Belanja Jasa Konsultansi non Konstruksi - Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik - Jasa Konsultansi Penyusunan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Bekasi

A. Lingkup Pekerjaan

Lingkup Kegiatan Penyedia Jasa Konsultansi dimaksud dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini terdiri dari :

a. Persiapan dan Koordinasi :

- Penentuan Isu Prioritas

Isu Prioritas adalah isu utama dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah. Penetapan isu prioritas didasarkan proses secara partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan di daerah. Proses penetapan isu prioritas wajib menggunakan pendekatan *Driving Force, Pressure, State, Impact, dan Response (DPSIR)*. Isu prioritas daerah minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) isu.

- Koordinasi dengan Unit Kerja Terkait.

b. Pelaksanaan :

- Survei data primer;

- Survei data sekunder dan pendukung, meliputi antara lain keadaan geografis, topografi, geohidrologi, klimatologi (curah hujan, suhu), Penggunaan Lahan, Kependudukan/Demografi, kondisi ekonomi, dan wilayah pesisir.

c. Pengolahan/Analisis Data

Pengolahan/analisis data merupakan pengolahan/ analisis hasil aktual pengukuran dilapangan yang kombinasikan dengan metoda – metoda ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, meliputi :

I. Analisis DPSIR Isu Lingkungan Hidup Daerah

Isu lingkungan di daerah dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) dianalisis dengan menggunakan *Driving Force, Pressure, State, Impact, Response (DPSIR) Analysis*, yang meliputi :

i. Tataguna Lahan

Tata guna lahan berikut tutupan lahannya. Untuk daerah yang berada di wilayah pesisir dan laut, wajib memasukan rencana pengelolaan pesisir dan laut. Data yang dituangkan dalam sub bab ini adalah yang berkaitan dengan tata guna lahan berikut perubahannya seperti luas

penggunaan lahan berdasarkan tata ruang wilayah, luas wilayah yang digunakan untuk usaha pemanfaatan hutan, perkebunan, pertambangan, pariwisata, dan lain sebagainya. Terhadap daerah yang berada dalam wilayah pesisir dan laut, wajib menuangkan data yang berkaitan dengan rencana tata ruang dan pemanfaatan pesisir dan laut. Data tidak hanya berbentuk angka (nominal), tetapi juga dengan prosentase (misalnya luas hutan lindung 20.000 ha atau x % dari luas wilayah administrasi daerah). Lengkapi juga data yang berkaitan dengan perizinan penggunaan atau pemanfaatan lahan sesuai dengan skala ekonominya (besar, menengah, dan kecil) termasuk status perizinannya (nama lengkap pemegang izin, luasan dan lokasi perizinannya). Data berbentuk spasial (peta) wajib digunakan untuk mendukung Analisis driving force, pressure, state, impact, dan response wajib didukung dengan data berkala (time series). Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. Sebagai contoh pengurangan atau penurunan hutan lindung, faktor driving force-nya (pemicu), pressure-nya dijelaskan dan didukung dengan data berkala (time series), demikian juga jelaskan bagaimana impact yang terjadi dan response telah dilakukan oleh daerah dengan didukung oleh data.

#### ii. Kualitas air

Data yang disajikan meliputi kualitas air sungai, air tanah, dan air laut (kualitas air laut khusus bagi daerah yang berada dalam wilayah pesisir dan laut). Contoh analisis air sungai tercemar industri tekstil, yang menjadi driving force-nya adalah banyaknya industri tekstil yang berada dalam wilayah pesisir dan laut, pressure adalah masih kurangnya industri yang memiliki IPAL, response-nya mendorong penataan industri agar membangun IPAL melalui pengawasan dan penegakan hukum. Data yang diperlukan untuk menunjang analisis DPSIR antara lain kualitas air sungai, danau, air tanah, dan air laut (khusus daerah yang berada di pesisir dan laut). Data kualitas dan kuantitas air DAS, jumlah penduduk yang tergantung dengan DAS, jumlah industri dan non industri pencemar (sumber pencemar) serta instalasi pengelolaan limbahnya, penggunaan air tanah, pipanisasi dan layanan air bersih, perizinan dan status kawasan pemanfaatan air, transportasi laut dan sungai, limbah domestik, irigasi, bahan pencemar. Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer.

#### iii. Kualitas udara

Data yang dituangkan meliputi status mutu udara ambien, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), kebakaran hutan dan lahan, ISPA, sumber pencemar (bergerak dan tidak bergerak),

konsumsi BBM, bahan pencemar. Contoh :kondisi udara ambien yang tercemar oleh logam berat, penyebabnya (pressure) adalah kondisi penggunaan BBM, kondisi kendaraan bermotor termasuk penjualannya, kondisi jalan, dan kondisi industri pencemar. Pemicu (driving force) bisa karena jumlah kendaraan bermotor yang banyak. Response dalam bentuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan tersebut, tentunya dituangkan dalam bentuk kebijakan dan program. Data yang dituangkan dalam response adalah peraturan dan program berikut dengan pelaksanaan dari peraturan dan program tersebut. Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer.

#### iv. Resiko bencana

Bencana yang dimaksudkan bisa berupa informasi rawan bencana atau kekhususan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana alam (seperti gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuhan, banjir, longsor), bencana non alam (seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit), dan bencana sosial (seperti konflik sosial). Driving Force diungkapkan dalam bentuk data yang terkait persoalan yang memicu terjadi bencana misalnya perubahan penggunaan lahan (land use), penyempitan badan sungai, kondisi drainase atau data lainnya yang menunjang. Data yang dituangkan dalam response adalah peraturan dan program berikut dengan pelaksanaan dari peraturan dan program tersebut. Informasi peta rawan lingkungan mutlak diperlukan untuk analisis pada sub bab ini. Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer.

#### v. Perkotaan

Perkembangan kota merupakan tuntutan sekaligus jawaban dari perkembangan penduduk maupun kegiatan masyarakat perkotaan kecenderungannya semakin sulit dikontrol sehingga seringkali menimbulkan persoalan yang menyangkut persoalan lingkungan (fasilitas, sistem dan area). Kemunduran lingkungan perkotaan telah terjadi di berbagai daerah, yang indikasinya dapat dilihat dari aspek fisik (pencemaran air, udara, kerusakan lahan, dan timbulan sampah) dan aspek sosial ekonomi (dampak dari manusia yang membuat kehidupan kurang nyaman). Data aspek fisik dan aspek sosial ekonomi yang merupakan kondisi eksis yang mutlak dituangkan dalam analisis, selanjutnya dijelaskan pressure dalam perkotaan yang didukung dengan data, dan response-nya adalah berbagai kebijakan dan program yang dikembangkan untuk mengatasi persoalan lingkungan perkotaan tersebut. Salah satu permasalahan perkotaan adalah sampah, yang meliputi sampah domestik (sampah

rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga), dan sampah spesifik. Data yang dituangkan berupa sumber sampah, produksi sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan sarana prasarana pengelolaan sampah. Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. Data yang dituangkan dalam pressure adalah penyebab terjadinya persoalan sampah. Response adalah upaya yang dilakukan dari mulai pengurangan dan penanganan sampah, yang berbentuk peraturan atau program daerah.

#### vi. Tata Kelola

Data seperti Pelestarian Kearifan lokal lingkungan hidup, perijinan, Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pendapatan Asli Daerah merupakan kondisi eksisting atau driving force (pendorong/pemicu) yang ditampilkan di dalam data. Pressure seperti pengaduan masyarakat yang timbul dalam pengelolaan LH, sedangkan jumlah personil lembaga pengelolaan lingkungan hidup dan jumlah staff fungsional yang ada dalam pengelolaan lingkungan hidup bisa merupakan kondisi eksisting atau state. Kegiatan atau program yang diinisiasi oleh masyarakat dan pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan merupakan response dari pressure yang timbul.

vii. Dan lain – lain yang belum terakomodir pada isu pada isu lingkungan dan kehumanan.

## II. Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah

Isu prioritas yang diambil adalah berdasarkan data-data yang sebelumnya telah jelaskan pada point I. Isu prioritas ini dapat mengenai driver (pemicu) munculnya permasalahan lingkungan hidup, pressure (berbagai penyebab terjadinya masalah, dapat berupa aspek-aspek sosial, ekonomi, birokrasi, kelembagaan maupun politik)), state (kondisi atau potret LH pada saat dinilai), impact (dampak) atas isu lingkungan yang muncul atau response (kebijakan, program maupun kegiatan yang berhubungan dengan jenis pressure yang ditetapkan untuk memperbaiki kondisi state). Isu prioritas paling banyak 5 (lima) dan paling sedikit 3 (tiga). Dalam merumuskan isu prioritas, deskripsi kondisi terutama keunikan daerah harus diungkap dan menjadi bahan pertimbangan. Yang dapat dijadikan isu prioritas adalah: (1) pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terjadi dan berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup ataupun pressure sebagai penyebab-penyebabnya, dan/atau persoalan respon yang dilakukan; dan (2) mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgent). Muatan yang dituangkan dalam Bab Isu Prioritas adalah yang berkaitan dengan proses

perumusan isu prioritas, mulai dari tahapan penyaringan isu hingga proses analisis yang digunakan untuk memperoleh isu prioritas.

### III. Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Memuat inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh kepala daerah dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Inisiatif yang dilakukan dalam bentuk peningkatan kapasitas lembaga daerah (seperti melalui APBD, peningkatan kapasitas personil, pengembangan jejaring kerja, peningkatan transparansi dan akuntabilitas kepada publik). Inisiatif yang dikembangkan oleh masyarakat (bila ada) harus dituangkan juga di dalam bab ini. Data yang mendukung dituangkan sejelas mungkin, sebagai contoh besaran APBD bidang lingkungan hidup termasuk persentasenya dibandingkan keseluruhan APBD. Inisiatif meliputi kegiatan atau program yang terkait dengan isu-isu perubahan iklim, perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas sumberdaya alam, dan perbaikan tata kelola lingkungan. Tabel 64 adalah inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya.

d. Pembahasan dan Evaluasi

e. Pelaporan:

- Penyusunan Laporan Pendahuluan;
- Penyusunan Laporan Antara;
- Penyusunan Laporan Akhir disertai CD laporan

Laporan Akhir terdiri atas 2 buku yaitu

#### 1. Ringkasan Eksekutif

Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Ringkasan Eksekutif maksimal terdiri atas 15 halaman.

#### 2. Laporan Utama

laporan utama informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah. Laporan utama ini disajikan dengan melakukan hubungan kausalitas antara unsur-unsur pemicu, penyebab terjadinya persoalan lingkungan hidup, status, akibat dan upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan (Driving Force, Pressure State, Impact and Response Analysis/ DPSIR).

## B. Batasan Pekerjaan

Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bekasi. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, studi banding, rapat pembahasan, rapat koordinasi, dan kunjungan lapangan dilakukan dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan dan pelaporan. Uraian dan batasan kegiatan lingkup pekerjaan ini dapat berubah sesuai dengan kesepakatan pada pelaksanaan rapat pembahasan dengan tim teknis.

## C. Keluaran Pekerjaan

Keluaran dari hasil pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi non Konstruksi - Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik - Jasa Konsultansi Penyusunan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Bekasi yang di dalamnya wajib memuat:

- a) Laporan Pendahuluan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Bekasi
- b) Laporan Antara Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Bekasi
- c) Laporan Akhir Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Bekasi disertai dengan Ringkasan Eksekutif, CD.